

# DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERDAGANGAN DALAM NEGERI KOMODITAS PERTANIAN

**Saktyanu K. Dermoredjo<sup>1</sup>, Yonas H. Saputra<sup>1</sup>, Delima H. Azahari<sup>1</sup>**

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111  
Korespondensi penulis: saktyanuadi@yahoo.com*

## PENDAHULUAN

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentang wilayah yang sangat luas, infrastruktur logistik yang belum memadai, dan biaya transportasi yang tinggi merupakan tantangan yang tidak mudah bagi penyediaan serta pendistribusian komoditas pertanian dan bahan pokok. Situasi ini memerlukan sinkronisasi dan keselarasan kemajuan antarsektor ekonomi dan antarwilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan merata. Di samping itu, dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah, perhatian terhadap jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi Covid-19, khususnya yang terkait dengan pangan. Aliran perdagangan pangan dapat dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara sehingga masing-masing jalur tersebut menjadi perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar ke seluruh wilayah Indonesia (Hirawan dan Verselita 2020).

Rangkaian logistik suatu komoditas meliputi manajemen rantai pasok yang menangani aliran barang, informasi, serta aliran uang agar aman, efektif, dan efisien untuk serangkaian proses pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pelayanan pengantaran dalam jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki. Menurut laporan *Logistic Performance Index* (LPI) World Bank tahun 2018, LPI Indonesia memperlihatkan sistem kinerja logistik yang lebih baik dengan skor 3,15 (urutan ke-46), sedangkan pada tahun 2010

---

<sup>1</sup> Kontributor utama

hanya memiliki skor 2,76 (urutan ke-75). Walaupun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang harus diperbaiki, di antaranya (a) sistem kepastian, (b) kualitas infrastruktur, (c) kompetensi, dan (d) kualitas pelayanan jasa serta biaya logistik (Sirait dan Hidayatullah 2019).

Meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 ke banyak negara, termasuk Indonesia, sejak bulan Maret 2020, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh pada upaya perbaikan sistem logistik nasional. Kinerja LPI Indonesia yang sudah menunjukkan perbaikan dapat terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 menunjukkan perlambatan -5,32% (*y-on-y*). Sektor ekonomi yang paling terpuruk pada masa pandemi ini adalah jasa transportasi dan pergudangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan hingga -30,84% pada triwulan II-2020 (*y-on-y*). Hampir semua lapangan usaha di sektor ini pertumbuhannya mengalami kontraksi, berturut-turut untuk angkutan rel, darat, laut, sungai, udara, dan pergudangan masing-masing mencapai hingga -63,75; -17,65; -17,48; -26,66; -80,23; dan -38,69% (BPS 2020a). Kondisi perlambatan akibat pandemi Covid-19 akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan komoditas pertanian dan pangan dalam negeri yang disebabkan karena terganggunya sistem logistik nasional.

Pada awal tahun 2020, Presiden Jokowi memberikan arah kebijakan penyediaan pangan dengan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan, mulai dari produksi hingga distribusi untuk menghadapi ancaman krisis pangan. Pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan gangguan pada produksi dan distribusi produk pertanian dan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (World Bank 2020). Dalam laporan "*Early Warning Early Action Report on Food Security and Agriculture*," FAO memberi peringatan tentang potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan ancaman kekeringan sebagai dampak perubahan iklim.

Salah satu kelemahan sistem logistik pangan Indonesia saat ini ialah masih menunjukkan ketidakmampuan dalam menghitung permintaan (*demand*) dan pasokan (*supply*) secara akurat dan *real time*.

Selain itu, sistem logistik saat ini belum dapat mencatat transaksi secara jujur, asli, dan transparan sehingga risiko kebocoran dan pengoplosan (*food adulteration*) dalam rantai pasok cukup tinggi. Kedua faktor tersebut dapat menyebabkan kelangkaan dan bahkan krisis pangan, terutama pada masa pandemi Covid-19, di mana terjadi fluktuasi permintaan dan pasokan (Cullen 2020). Adapun tantangan ketahanan pangan pada masa dan pasca-Covid-19 adalah (a) produksi dan preferensi konsumen, (b) konsumsi (kuantitas dan kualitas), (c) distribusi antarprovinsi dan pulau, (d) harga cenderung tidak berpola, dan (e) ancaman kekeringan (Hendriardi 2020).

Tulisan ini bertujuan untuk membahas seberapa jauh dampak pandemi Covid-19 terhadap perdagangan dalam negeri komoditas pertanian, terutama dari aspek ketersediaan bahan pangan pokok, intervensi distribusi, dan dinamika harga pada masa pandemi Covid-19, dampak terhadap perdagangan retail, serta mitigasi kebijakan sistem logistik pangan nasional komoditas bahan pokok, untuk dapat memberikan informasi yang akan memberikan saran dalam kebijakan perdagangan dalam negeri pada masa dan pascapandemi Covid-19.

## METODE

Analisis diawali dengan uraian mengenai kebijakan pemerintah saat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Maret sampai dengan Juni 2020, dan mulainya masa transisi 1 Juni 2020. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam perdagangan dalam negeri, baik perdagangan dengan *e-commerce*, perdagangan retail, harga bahan pokok, dan terutama alat kesehatan. Kebijakan PSBB juga berpengaruh pada komponen Sistem Logistik Pangan yang terdiri dari (a) sistem produksi pertanian yang menghasilkan beraneka ragam produk pertanian yang menjadi sumber utama pangan; (b) sistem pengumpulan (*collection*) produk pertanian, mencakup sistem pengumpulan produk pertanian; (c) sistem pengolahan hasil pertanian (agroindustri) mencakup pengolahan hasil pertanian dengan teknologi sederhana dan mutakhir; (d) sistem distribusi produk akhir, mencakup transportasi dari industri

pengolahan ke konsumen akhir; dan (e) sistem permintaan konsumen, mencakup prediksi permintaan konsumen di tengah bencana dan perubahan global (*uncertainty*) (Zurayk 2020).

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan dianalisis secara deskriptif. Bahan tulisan diperoleh melalui tinjauan (*review*) pustaka dengan menggali dan menelaah data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, serta informasi yang relevan dari berbagai hasil kajian yang diterbitkan dalam berbagai publikasi, seperti buku, jurnal, bahan presentasi dari berbagai webinar, *virtual conference*, prosiding, dan publikasi lainnya, termasuk media cetak dan media elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Ketersediaan Pangan dan Intervensi Distribusi**

Dampak dari pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap pasokan komoditas pangan utama. Hal ini terjadi secara keseluruhan sebagai akibat adanya kebijakan PSBB yang memengaruhi ketersediaan pangan di pasar konsumen, sehingga harga yang terjadi di pasar konsumen dan produsen mengalami penurunan. Penurunan harga di tingkat produsen disebabkan terjadi penumpukan produknya, sedangkan di tingkat konsumen karena terjadi jumlah pembeli atau daya beli menurun. Tantangan pada masa awal pandemi Covid-19 antara lain (a) pasokan ada tetapi tidak dapat dikirim ke konsumen dan karena pada umumnya sifat komoditas pangan adalah cepat rusak atau *perishable*, maka yang terjadi adalah penumpukan barang sehingga harga turun atau dibuang; (b) pasokan menurun akibat kurangnya tenaga kerja, penyaluran sarana produksi terhambat, dan terbatasnya impor; dan (c) distribusi produk ke konsumen tidak merata atau terhambat karena permintaan konsumen sangat fluktuatif dan sulit diramalkan (Akerman 2020).

Secara keseluruhan, neraca kebutuhan bahan pokok nasional menunjukkan kondisi surplus, baik yang terjadi pada awal pandemi (pertengahan Maret 2020) yang ditunjukkan periode April–Juni 2020 maupun setelah diberlakukan masa transisi (mulai 1 Juni 2020), yaitu pada bulan September–Desember 2020 (Tabel 1). Dari kedua periode tersebut, yang cukup menjadi perhatian adalah komoditas cabai merah dan telur ayam karena selisih antara kebutuhan dan ketersediaan mencapai lebih dari 90%, artinya perlu kehati-hatian untuk menjaga keseimbangan kebutuhan dan ketersediaan. Untuk komoditas beras, bawang merah, daging ayam, gula pasir, dan minyak goreng relatif cukup, kecuali untuk bawang merah pada periode kedua ini mencapai 98% (artinya kebutuhan dan ketersediaan relatif seimbang). Untuk melihat seberapa jauh kesiapan pada periode awal ketersediaan dan kebutuhan dilakukan dengan melihat besarnya persentase dari neraca terhadap kebutuhan. Tabel 1 menunjukkan periode kedua mengalami penurunan, yaitu untuk komoditas beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng, sedangkan yang mengalami peningkatan persentase neraca terhadap kebutuhan adalah daging ayam dan gula pasir. Uraian tersebut menunjukkan bahwa untuk beberapa komoditas neraca bahan pokok sudah mendekati kebutuhannya. Apabila terjadi gangguan pada pasokan akan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kebutuhannya.

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya dinamika neraca bahan pangan pokok yang memerlukan intervensi distribusi terhadap komoditas pangan tersebut dari daerah surplus ke daerah defisit. Seperti diketahui bahwa sebagian besar sentra produksi komoditas pangan berasal dari Pulau Jawa serta Sulawesi Selatan, kecuali untuk telur ayam sebagai sentra produksi adalah dari Sumatera Utara. Tabel 2 menunjukkan terjadi aliran dari daerah surplus ke daerah defisit karena perbedaan harga, walaupun pada beberapa bagian ada harga tingkat eceran di provinsi surplus lebih tinggi dibandingkan di provinsi penerima.

Tabel 1. Perkiraan ketersediaan, kebutuhan, dan neraca bahan pokok, 2020

No	April –Juni 2020				September–Desember 2020			
	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca	Persentase	Ketersediaan	Kebutuhan	Neraca	Persentase
	(1)	(2)	(3)	$[(2)/(1)]*100 [(3)/(2)]*100$	(4)	(5)	(6)	$[(5)/(4)]*100 [(6)/(5)]*100$
	----- ribu ton -----		----- % -----		----- ribu ton -----		----- % -----	
1. Beras	14.009	7.608	6.402	54,30	17.592	9.989	7.603	56,78
2. Cabai merah	305	278	28	90,95	347	335	12	96,52
3. Bawang merah	677	346	330	51,19	362	328	34	90,50
4. Telur ayam	1.348	1.284	63	95,29	1.643	1.607	35	97,85
5. Daging ayam	869	563	306	64,77	1.718	647	1.071	37,67
6. Gula pasir	1.782	708	1.073	39,75	2.392	922	1.470	38,54
7. Minyak goreng	7.118	1.349	5.770	18,95	9.008	1.722	7.287	19,10

Sumber: BKP (2020a, 2020b)

Tabel 2. Intervensi distribusi komoditas pangan pada awal pandemi (April 2020) dan pada masa transisi (September 2020)

Komoditas	April 2020		Sep-20			
	Provinsi surplus/pemasok	Provinsi defisit (penerima)	Provinsi surplus/pemasok	Provinsi defisit (penerima)		
Cabai merah	Jateng (2.625)	Kalbar (-385)	Jateng (744)	Kalbar (-359)		
		Kalteng (-210)		Kalteng (-159)		
	Sulsel (156)	Kaltara (-27)	Sulsel (693)	Kaltim (-220)		
		Papua (-209)		Kaltara (-30)		
				Sumut (154)		
				Kepri (31)		
				Gorontalo (-89)		
				Sulteng (-88)		
				Sulut (-126)		
				Maluku (-102)		
	Malut (-70)					
	Papua Barat (-68)					
	Papua (-203)					
Cabai rawit	Jatim (5.472)	Kalbar (-303)	Jatim (3.138)	Kalbar (-261)		
		Kaltim (-172)		Kalteng (-122)		
		Kalteng (-144)		Kepri (-156)		
	Sulsel (204)	Kaltara (-9)	Jateng (1.309)	Malut (-63)		
		NTT (-324)	Sulsel (1.207)	Papua Barat (-49)		
		Jateng (903)	Jabar (-909)	Papua (-77)		
			Papua (-108)			
Bawang merah	Jateng (11.413)	DKI Jakarta (805)	Jateng (13.225)	Kaltara (-34)		
		Banten (-1218)				
		Lampung (-933)				
		Sumsel (-902)				
		Kep. Babel (-188)				
		Jambi (-321)				
		Riau (-995)				
		Bengkulu (-177)			Sumbar (790)	Kepri (-192)
		Sumut (-1.406)				
		Aceh (-455)				
	Jatim (4.767)	Kalbar (-325)				
	Kalteng (-267)					
	Kaltara (-53)					

Tabel 2. Lanjutan

Komoditas	April 2020		Sep-20		
	Provinsi surplus/ semasok	Provinsi defisit (penerima)	Provinsi surplus/ pemasok	Provinsi defisit (penerima)	
Bawang merah	Sulsel (2.443)	Sulbar (-96)	Sulsel (3.013)	Sultra (-91)	
		Sultra (-151)		Maluku (-71)	
		Gorontalo (-124)			
		Sulut (-203)		Malut (-53)	
		Maluku (-122)			
		Malut (-66)		Papua Barat (-44)	
		Papua Barat (-76)			
	Papua (-301)	Papua (-186)			
Telur ayam	Jatim (25.206)	Kaltara (-255)	Sulsel (6.950)	Maluku (-198)	
		Papua Barat (-310)			
		Papua (-879)			
		Sulsel (5.142)		Gorontalo (-197)	Maluku Utara (-108)
				Maluku (-691)	
	Maluku Utara (-474)				

Sumber: BKP (2020a, 2020b, 2020d)

Keterangan: Angka dalam tanda kurung adalah volume surplus/defisit dalam ton

Beras dan gula pasir merupakan komoditas bahan pokok strategis yang diawasi oleh pemerintah sehingga intervensi distribusinya dilakukan oleh Bulog, sementara untuk minyak goreng hampir semua provinsi mengalami surplus sehingga hampir tidak ada intervensi distribusi antarprovinsi. Adapun komoditas bahan pokok lainnya membutuhkan intervensi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit.

Pada masa pandemi Covid-19 terlihat adanya perbedaan intervensi distribusi sebelum dan sesudah masa transisi (Juni 2020). Intervensi sesudah transisi relatif berbeda dibandingkan sebelumnya, artinya ada komoditas yang pada masa sebelum transisi lebih intensif intervensi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Sebagai contoh adalah cabai merah pada saat awal pandemi intervensi terjadi hanya pada empat provinsi defisit, sedangkan setelah transisi target provinsi defisit mencapai enam provinsi. Pola intervensi distribusi yang sama dengan cabai merah terjadi pada komoditas cabai rawit



dan telur ayam. Hal ini menunjukkan pada saat awal pandemi telah terjadi pembatasan intervensi akibat kebijakan PSBB. Namun sebaliknya, terjadi pada komoditas bawang merah pada saat awal pandemi jumlah intervensi ke 22 provinsi, sebaliknya setelah masa transisi jumlah intervensi berkurang menjadi hanya tujuh provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat masa transisi, provinsi defisit bawang merah sudah dapat menyediakan kebutuhannya sendiri, tidak tergantung dari intervensi dari daerah surplus.

Cadangan dan pasokan pangan harus dipastikan cukup untuk menjamin ketersediaan pangan antardaerah dan antarwaktu. Kalau produksi domestik kurang mencukupi dapat dilakukan melalui impor. Adanya pandemi Covid-19 akan memengaruhi ketersediaan pangan antarwaktu jika manajemen stok pangan kurang baik. Peranan Bulog dalam manajemen cadangan (stok) dan distribusi pangan sangat menentukan keberhasilan distribusi daerah dan antarwaktu. Subsidi transportasi dari daerah surplus ke daerah defisit pangan sangat diperlukan untuk mengurangi dampak Covid-19 pada ketahanan pangan.

Pengamanan ketersediaan pangan pada masa pandemi Covid-19 di sentra produksi pangan perlu sekaligus ditujukan untuk menjaga pendapatan petani agar tidak jatuh melalui peningkatan akses petani terhadap teknologi, kredit, dan saprodi yang lebih baik (subsidi saprodi), disertai jaminan harga, akses terhadap pasar (subsidi distribusi) dari hasil produksi pangan. Memerhatikan pola distribusi komoditas bahan pangan pokok, terjadi variasi disparitas harga mulai dari 5,21% (minyak goreng) sampai dengan 74,07% (daging ayam ras), kondisi pandemi Covid-19 memerlukan kebijakan yang berpihak pada memperkecil disparitas antara harga produsen dan konsumen (Tabel 3).

### **Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Dinamika Harga Antarwilayah dan Antarwaktu**

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap dinamika harga antarwilayah dan antarwaktu sebagai akibat dari perbedaan ketersediaan dan kebutuhan serta posisi stok/neraca. Perbedaan harga eceran di tingkat produsen atau daerah surplus dengan harga eceran di

Tabel 3. Pola distribusi dan disparitas harga pangan di produsen dan konsumen untuk berbagai komoditas pangan pokok, 2020

No. Komoditas	Pola umum distribusi	Disparitas harga (%)
1. Beras	Produsen --> distributor (1 ... n) --> pedagang eceran --> konsumen akhir	18,17
2. Cabai merah	Petani --> pedagang grosir (1 ... n) --> pedagang eceran --> konsumen akhir	65,57
3. Daging ayam ras	Produsen --> pengepul (1 ... n) --> pedagang eceran --> konsumen akhir	74,07*
4. Daging Sapi	Jalur produsen: produsen --> pedagang grosir (RPH) --> pedagang eceran -->konsumen akhir Jalur importir: importir --> distributor (1 ... n) --> pedagang eceran --> konsumen akhir	59,61**
5. Bawang merah	Petani --> pedagang pengepul (1 ... n) --> pedagang eceran --> konsumen akhir	55,56
6. Telur ayam ras	Produsen --> pedagang grosir (1 ... n) --> pedagang eceran --> konsumen akhir	16,84
7. Gula pasir	Produsen- --> distributor --> pedagang grosir --> pedagang eceran --> konsumen akhir	24,20***
8. Minyak goreng	Produsen --> distributor --> pedagang eceran --> konsumen akhir	5,21***

Sumber: BKP (2020c)

Keterangan:

\* Perbandingan harga *live bird* di peternak dengan daging ayam ras di konsumen

\*\* Perbandingan antara sapi hidup di peternak dengan daging sapi konsumen

\*\*\* Perbandingan antara HAP dengan harga di konsumen

tingkat konsumen pada awal pandemi menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Sebagai contoh, harga di tingkat produsen cabai merah di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp13.091 per kg dan harga eceran cabai merah di provinsi defisit Papua mencapai Rp78.977 per kg atau 600% (Tabel 4). Adapun harga bawang merah di tingkat produsen di Sulawesi Selatan sebesar Rp17.800 per kg dan harga eceran bawang merah di Provinsi Maluku sebesar Rp49.714 per kg atau 282%.

Tabel 4. Perbedaan harga di produsen dan harga eceran komoditas pangan, April–Mei 2020 dan September 2020

Komoditas	April–Mei 2020				Sep-20			
	Provinsi surplus/pemasok	Harga produsen	Provinsi defisit (penerima)	Harga eceran	Provinsi surplus/pemasok	Harga produsen	Provinsi defisit (penerima)	Harga eceran
Cabai merah	Sulsel	13.091	Papua	78.977	Sulsel	24.500	Papua	37.200
Cabai rawit	Jatim	12.742	Kalbar	56.554	Jatim	9.278	Kalbar	55.575
Bawang merah	Sulsel	17.600	Papua	61.250	Sulsel	21.500	Papua	44.450
Telur ayam	Sulsel	21.580	Malut	35.150	Sulsel	20.775*	Malut	34.200

Sumber: BKP (2020a, 2020b)

Kondisi pada masa transisi terjadi penurunan perbedaan harga di tingkat produsen daerah surplus dengan harga di tingkat eceran daerah defisit. Sebagai contoh, di tingkat produsen Provinsi Sulawesi Selatan harga cabai merah sebesar Rp24.500 per kg, sementara harga eceran cabai merah di provinsi defisit Papua mencapai Rp37.200 per kg atau 152%. Adapun harga bawang merah di tingkat produsen Sulawesi Selatan sebesar Rp21.500 per kg dan harga eceran bawang merah di Provinsi Maluku sebesar Rp35.950 per kg atau 167%. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal masa pandemi, pembatasan transportasi dan distribusi bahan pokok, terutama yang bersifat *perishable*, menyebabkan perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen antara daerah surplus dan defisit sangat tinggi sebagai akibat terbatasnya angkutan dan tenaga kerja.

Dinamika harga produsen dan konsumen juga dapat dilihat dari perbedaan harga antarwaktu, yaitu dinamika harga yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 saat terjadi *shock* akibat pandemi Covid-19. Tabel 5 menunjukkan secara umum pada tahun 2020, harga komoditas pangan mengalami penurunan (tren negatif), atau cenderung stagnan, berbeda dengan dinamika yang terjadi di tahun 2019, saat sebagian besar terjadi kenaikan harga. Namun, yang menjadi masalah pada masa pandemi Covid-19 adalah tidak ada kenaikan harga antara tahun 2019 dan 2020 pada komoditas tertentu. Tabel 5 juga menunjukkan terjadinya penurunan harga pada komoditas cabai merah dan daging ayam, sebagai akibat kebijakan PSBB dan telah mengakibatkan gangguan pada distribusi komoditas bahan pangan pokok pangan yang *perishable* dan juga terjadi penurunan permintaan akibat pembatasan produksi dan jam operasional restoran/kafe/hotel/katering.

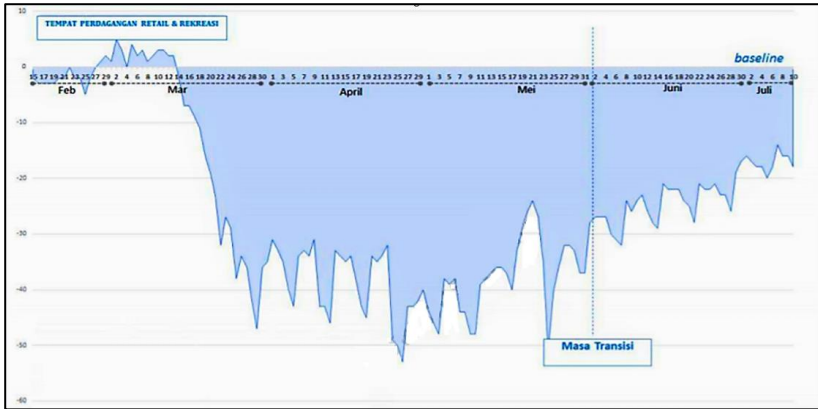
### **Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Penjualan Eceran**

Dinamika yang terjadi di pasar komoditas di tingkat konsumen (eceran) terlihat mengalami penurunan karena aktivitas masyarakat untuk mendatangi tempat perdagangan retail (juga rekreasi) mengalami penurunan. Dari Gambar 1 terlihat saat diberlakukannya PSBB aktivitas di tempat perdagangan retail menurun tajam hingga sekitar -50%.

Tabel 5. Rata-rata dan pertumbuhan harga komoditas pangan utama, Maret–September 2019 dan 2020.

Komoditas	Produsen		Konsumen		Produsen		Konsumen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Rp/kg							
	% /bulan							
Beras medium	9.330	9.340	11.817	11.909	-1,04	-0,64	-0,09	-0,17
Bawang merah	21.972	27.523	33.942	41.981	0,31	-2,39	-5,65	-6,36
Cabai merah	27.655	19.230	45.618	32.565	16,82	-3,28	10,40	-1,62
Daging ayam	24.001	23.048	33.593	33.140	-0,66	0,52	0,61	0,47
Telur ayam	21.725	23.113	24.846	25.532	0,31	0,01	0,17	0,01
Gula pasir	10.371	12.524	13.646	16.170	1,81	-3,59	0,64	-3,51
Minyak goreng	9.540	10.699	13.158	13.744	-0,51	-0,10	-0,06	0,13

Sumber: Bank Indonesia 2020a (diolah)



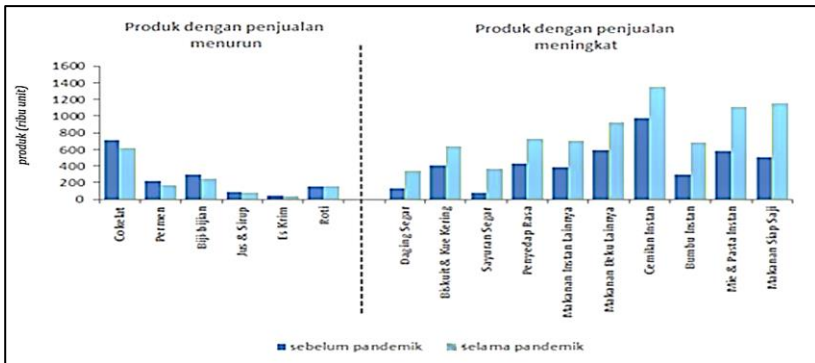
Sumber: BPS (2020b)

Gambar 1. Penurunan aktivitas perdagangan retail dan rekreasi

Namun, terjadi pula peningkatan dalam aktivitas di tempat perdagangan saat dimulainya masa transisi, walaupun belum mencapai ke situasi normal seperti sebelum bulan Maret 2020. Beberapa komoditas produk pangan mengalami pergerakan harga yang dinamis pada masa pandemi ini.

Produk-produk olahan dari komoditas pertanian juga mengalami penurunan (Gambar 2), terutama produk pangan: cokelat, permen, biji-bijian, jus dan sirop, es krim, dan roti; sedangkan produk akhir yang mengalami peningkatan: daging segar, biskuit dan kue kering, sayuran segar, penyedap rasa, makanan instan lainnya, makanan beku lainnya, bumbu instan, mi dan pasta instan, dan makanan siap saji. Dampaknya adalah penjualan produk di tingkat eceran mengalami fluktuasi. Laporan Bank Indonesia (2020b) memperlihatkan bahwa tingkat penjualan produk sudah negatif. Hal ini ditunjukkan sepanjang bulan Januari–Mei 2020 yang mengalami penurunan drastis dimulai pada bulan Maret sebesar -4,5%, selanjutnya turun terus pada bulan April dan Mei hingga -16,9% dan -22,9%. Namun, pada bulan Juni 2020 sudah menunjukkan perbaikan, yaitu mencapai -17,1%; Juli -12,3; Agustus -9,2%; dan September -7,3% (Gambar 3). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa membaiknya penjualan eceran juga masih

didorong oleh peningkatan permintaan karena meningkatnya daya beli masyarakat sejalan dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, kelancaran distribusi, dan banyaknya program diskon. Namun demikian, penurunan tingkat penjualan eceran bahkan telah menyebabkan beberapa pelaku usaha perdagangan harus menutup usahanya, dan pada periode Januari–April 2020 jumlah usaha yang ditutup mencapai 30 juta unit.



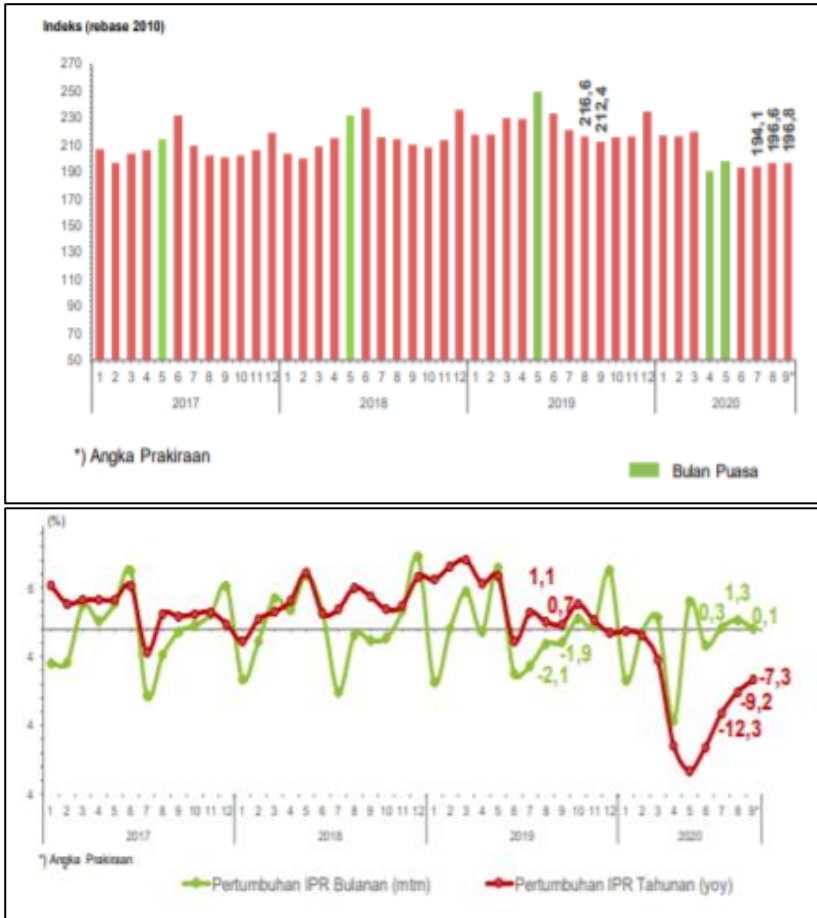
Sumber: BPS (2020b)

Gambar 2. Penjualan produk makanan pada masa pandemi Covid-19, 2020

### Kebijakan Perdagangan Merespons Dampak Pandemi Covid-19

Dalam mengantisipasi dampak pandemi Covid-19, tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan adalah mengeluarkan surat keputusan No. 317/M-DAG/SD/04/2020 tanggal 3 April 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta serta Bupati/Walikota seluruh Indonesia, yang menekankan agar selama PSBB dapat dijaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai permintaan untuk (a) membuka akses pengantaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting selama protokol kesehatan tentang Covid-19 dipenuhi; (b) mengatur jam kerja pasar rakyat dan toko swalayan yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan tetap menjalankan protokol kesehatan tentang Covid-19; dan (c) menghimbau para pengecer dan

pedagang pasar rakyat dapat melayani konsumen secara langsung dengan menerapkan *social distancing* dan terkait dengan pelayanan pesan antar.



Sumber: Bank Indonesia (2020b)

Gambar 3. Perkembangan indeks penjualan riil tahun 2007–2020

Selain itu, Badan POM telah mengeluarkan “Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada Masa Status Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia” yang bertujuan untuk



pengecahan penyebaran Covid-19 di sarana produksi dan distribusi, termasuk aspek sanitasi, higienis, dan kesehatan personel/individu, serta pembatasan jarak fisik atau *social distancing*. Pedoman ini harus diterapkan khususnya pada kondisi darurat wabah Covid-19, yang ditetapkan pemerintah sebagai masa tanggap kedaruratan kesehatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan penjaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pedoman ini akan diperbaharui sesuai perkembangan ilmiah dan kebutuhan terkini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 (BPOM 2020).

Perdagangan pertanian dalam negeri memerlukan penyesuaian terhadap apa yang terjadi proses perubahan-perubahan terjadi di luar yurisdiksi Indonesia. Pada masa pandemi Covid-19, seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi. Negara-negara tersebut cenderung menurunkan impornya demi menjaga devisanya. Dengan demikian, bila terjadi pembatasan ekspor untuk komoditas tertentu, perlu meningkatkan konsumsi dalam negeri dan sudah barang tentu perdagangan dalam negeri perlu ditingkatkan melalui kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas *Indonesia National Single Windows* (INSW) antarlembaga terkait, yang di dalamnya berkaitan dengan perdagangan antarpulau. Perdagangan antarpulau yang lancar akan mengurangi dampak pandemi (PSBB di sentra konsumen seperti Jabodetabek) sehingga kegagalan masuknya produk pertanian di sentra konsumen seperti Jabodetabek dapat mengalir dengan baik ke daerah lain, khususnya di luar Jawa (Lukman 2020).

Alur perdagangan komoditas pertanian mulai dari produsen hingga konsumen perlu melihat bagaimana yang dipersiapkan menghadapi pandemi Covid-19 ini. Perlu adanya pengelolaan jaringan pasar induk yang terintegrasi, baik dari sisi kualitas produk, variasi produk, dan ketersediaan produk (Parwadi 2020). Ekonomi pasar yang berkembang saat ini telah memberi pelajaran bahwa upaya mendekatkan petani ke pasar memberi peluang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional (World Bank 2008).

Pertumbuhan sektor jasa transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi yang cukup tinggi, namun akses pangan jangan sampai terganggu dengan kontraksi dari sektor tersebut. Pelaku usaha perdagangan realistis terhadap penurunan ekonomi dan mereka tetap melakukan distribusi yang utama darat dan laut yang kontraksinya yang paling rendah. Konektivitas antarpulau dalam kerangka perdagangan lintas daerah ini tetap mengandalkan Jawa-Bali dan Sumatera yang memiliki hubungan ekonomi antardaerah, terutama produk makanan dan minuman olahan (Resosudarmo et al. 2008; Dahuri 2020).

Kontribusi tol laut yang efisien, seperti yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, maka jalur darat juga diperlukan untuk aksesibilitas pangan ke sentra konsumen dengan baik dan lancar (Santia 2020). Pada masa pandemi, pertumbuhan transportasi kereta -63,75%, yang pada gilirannya juga akan berdampak pada kelancaran distribusi komoditas pertanian. Untuk itu, pemerintah telah merancang sistem logistik pangan berbasis kereta api untuk memudahkan distribusi pangan khususnya di tengah kebijakan PSBB atau model pembatasan wilayah lainnya yang ditetapkan di sejumlah daerah. Kereta api sebagai tulang punggung logistik pangan di pulau besar dapat terus dioptimalkan pemanfaatannya setelah masa pandemi Covid-19 berakhir. Selain dapat memangkas waktu perjalanan, pemanfaatan angkutan logistik ini juga dapat memangkas biaya distribusi (Musdhalifah 2020; Firdaus dan Widhyasanti 2010).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perdagangan dalam negeri untuk produk pertanian termasuk bahan pokok. Kebijakan PSBB yang diterapkan selama pandemi telah membuat aktivitas sektor pertanian (pangan) mengalami penurunan, yaitu (a) penurunan tingkat neraca pangan (bahan pokok), namun tingkat inflasi harga produk esensial khususnya bahan pangan cukup terkendali; (b) terjadinya intervensi distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit diakibatkan

adanya kekurangan produk dan perbedaan harga; (c) pola distribusi bahan pangan pokok menunjukkan adanya variasi disparitas harga yang cukup besar sehingga memerlukan intervensi kebijakan subsidi distribusi; (d) terdapat dinamika variasi harga antarwilayah dan antarwaktu yang memerlukan penanganan manajemen stok dan logistik pangan; (e) terdapat perbaikan pertumbuhan indeks penjualan riil yang semakin mendekati nol atau mulai mengalami perbaikan; dan (f) mitigasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap pemulihan ekonomi nasional, pada hakekatnya sudah menunjukkan perbaikan kondisi namun masih diperlukan upaya yang lebih untuk membangkitkan para pelaku usaha kecil UMKM dan pemangku kepentingan lainnya, berupa stimulus ekonomi dan pelonggaran kebijakan.

## Saran

Menyimak perkembangan kontraksi perdagangan pertanian dalam negeri, diperlukan kebijakan jaminan transportasi dan distribusi dalam masa transisi dan pascapandemi Covid-19 pangan dari provinsi surplus ke provinsi minus untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai di setiap provinsi. Untuk itu, diperlukan pembangunan sistem logistik pangan nasional secara konsisten untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia penguatan sistem informasi ketersediaan (produksi, stok, dan impor) dan kebutuhan pangan serta monitoring *real time* secara akurat, transparan, dan aksesibilitas terhadap dinamika harga pangan dan biaya distribusi. Adapun strategi pengembangan sistem logistik pangan nasional meliputi (a) peningkatan produksi, (b) perbaikan sistem distribusi, (c) pengembangan kelembagaan, dan (d) mendorong konsumsi pangan lokal. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dan untuk memperlancar intervensi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dan untuk menstabilkan perbedaan harga antarwilayah dan antarwaktu diperlukan fasilitas biaya distribusi pangan melalui penyediaan subsidi tol laut dengan memperhatikan penyempurnaan aturan manifes setiap pengiriman bahan pokok, terutama perdagangan antarpulau, sehingga lalu lintas volume dan jenis bahan pokok tersebut

dapat terpantau agar keamanan pangan tetap terjaga dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Barang yang Diangkut dalam Program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Terkait dengan hal ini, agar dipercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 29 Tahun 2017 tentang Perdagangan Antar-Pulau.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akerman, Yandra, Hermadi I. 2020. Sistem logistik pangan saat pandemi Covid-19 dan setelahnya. Bahan presentasi pada Webinar Sistem Logistik Pangan, DPIS, IPB; 2020 Mei 6.
- Bank Indonesia. 2020a. Tabel harga berdasarkan daerah [Internet]. [diunduh 2020 Sep 29]. Tersedia dari: <https://hargapangan.id/tabel-harga/pasar-tradisional/daerah>
- Bank Indonesia. 2020b. Survei penjualan eceran. Agustus-2020 [Internet]. [diunduh 2020 Okt 10]. Tersedia dari: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/penjualan-eceran/Pages/SPE-Agustus-2020.aspx>
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2020a. Mengamankan logistik pangan pada masa dan pasca pandemi Covid 19. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2020b. Posisi stok komoditas pangan strategis minggu IV September 2020. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2020c. Margin perdagangan dan pengangkutan komoditas pangan pokok/strategis nasional tahun 2017-2018. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2020d. Neraca stok pangan strategis nasional bulan April 2020. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [BPOM] Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2020. Pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa status darurat kesehatan corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Jakarta (ID): Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- [BPS] Badan Pusat Statistik [Internet]. 2020a. Berita resmi statistik 5 Agustus 2020. [diunduh 2020 Ags 25]. Tersedia dari: [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20200805114633.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200805114633.pdf)

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020b. Analisis big data di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Cullen MT. 2020. Coronavirus food supply chain under strain what to do? Food and Agriculture Organization of the United Nations. Webinar Food Systems Transformation; 2020 Mar 24.
- Dahuri R. 2020. Pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran baru berbasis ekonomi kelautan dan inovasi menuju Indonesia maju, adil-makmur, dan berdaulat. Webinar Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Terdepan sebagai Sabuk Ekonomi Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan; 2020 Jun 18.
- Firdaus M, Widayanti AA. 2010. Indonesian interprovincial trade: what can be revealed from a gravity modeling [Internet]. The 10th IRSA (Indonesian Regional Science Association) International Conference; 2010 Jul 28-29; Surabaya, Indonesia. [cited 2020 Sep 20]. Available from: [https://artnet.unescap.org/tid/artnet/mtg/gravity10\\_weds3.pdf](https://artnet.unescap.org/tid/artnet/mtg/gravity10_weds3.pdf)
- Hendriardi A. 2020. Mengamankan sistem logistik pangan pada masa dan pasca pandemi covid-19. Bahan presentasi pada Webinar Sistem Logistik Pangan, DPIS, IPB; 2020 Mei 6.
- Hirawan FB, Verselita AA. 2020. Kebijakan pangan pada masa pandemi covid-19 [Internet]. CSIS Commentaries DMRU-048-ID. Jakarta (ID): Centre for Strategic and International Studies; [diunduh 2020 Ags 25]. Tersedia dari: [https://csis.or.id/download/242-post-2020-04-14-CSIS\\_Commentaries\\_DMRU\\_048\\_ID\\_HirawanVerselita.pdf](https://csis.or.id/download/242-post-2020-04-14-CSIS_Commentaries_DMRU_048_ID_HirawanVerselita.pdf)
- Lukman LM. 2020 Jun 7. Penjualan sayuran dari Garut ke pasar di kota besar kembali normal [Internet]. [diunduh 2020 Sep 20]. Tersedia dari: <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35564576/penjualan-sayuran-dari-garut-ke-pasar-di-kota-besar-kembali-normal>
- Musdhalifah M. 2020. Arah kebijakan ekonomi pangan pada masa Pandemi Covid-19 dan setelahnya. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Parwadi S. 2020. Stabilitas, kuantitas, kontinyuitas, & distribusi pangan di tengah pandemi Covid-19. Bahan presentasi pada Webinar Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia, Paskomnas Indonesia-Komtap Hortikultura Kadin Indonesia; 2020 Jun 10.

- Resosudarmo B, Hartono D, Nurdianto D. 2008. Inter-Island economic linkages and connections in Indonesia. *Econ Financ Indones*. 56(3):297-327.
- Santia T. 2020 Jun 21. Tol laut diharapkan mampu jaga pasokan logistik di tengah pandemi [Internet]. [diunduh 2020 Sep 20]. Tersedia dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4284787/tol-laut-diharapkan-mampu-jaga-pasokan-logistik-di-tengah-pandemi>.
- Sirait RA, Hidayatullah T. 2019. Meningkatkan kinerja logistik Indonesia. *Bul APBN*. 4(1):11-15.
- World Bank. 2008. *World development report 2008: Agriculture for development*. Quebecor World. Washington, DC (US): World Bank.
- World Bank. 2020. A shock like no other: The impact of covid-19 on commodity markets. *Commodity Markets Outlook April 2020*:7-15. Washington (US): World Bank.
- Zurayk R. 2020. Pandemic and food security: A view from the global south. *J Agric Food Syst Community Dev* [Internet]. [cited 2020 Nov 14]; 9(3):1-5. Available from: <https://www.foodsystemsjournal.org/index.php/fsj/article/view/803> doi:10.5304/jafscd.2020.093.014.